

## GERAKAN MASSA PASCA PENDUDUKAN AMERIKA DI JEPANG

Rafiqa Nur'aini Al Hakim

*Institut Kajian Asia Timur*

---

### Abstrak

Tulisan ini akan membahas mengenai gerakan massa masyarakat yang sempat mekar di Jepang pada tahun 1945 sesudah Perang Dunia II hingga 1970an dimana isu Perang Vietnam menyeruak. Periode yang sangat krusial bagi masyarakat Jepang karena pada masa itu mereka menentukan bagaimana visi dan misi negara mereka setelah dikalahkan dalam Perang Dunia II yang mengarah pada pasifisme atau anti perang. Gerakan massa yang dilakukan oleh masyarakat Jepang pada saat itu termasuk sebuah fenomena geliat demokrasi yang tidak lepas dari andil pendudukan Amerika pada saat itu. Tulisan ini ditulis berdasarkan koran kampus Rikkyo tahun 1954-1967 serta buku dan jurnal yang digunakan sebagai informasi sejarah. Dengan tulisan ini, diharapkan pembaca menjadi lebih tahu mengenai keadaan masyarakat Jepang di tahun 1945 hingga 1970an khususnya bagaimana gerakan massa yang terjadi pada masa itu.

Kata kunci : Gerakan massa Jepang, pasifisme, demokrasi

### Abstract

This paper will discuss about the mass movement that was held in Japan in 1945 after World War II to the 1970s when the Vietnam War issue arose. The period which was very important for the Japanese people at that time determined their vision and mission after being defeated in World War II which led to pacifism or anti-war. The mass movement carried out by the Japanese people at that time was included in the phenomenon of democracy which was inseparable from the American occupation at that time. This paper was published using the Rikkyo campus newspaper in 1954-1967 and also books and journals used as historical information. With this writing, it is hoped that the reader will become more aware of Japanese society in 1945 through the 1970s as was the mass movement that occurred at that time.

Keywords: Japanese mass movement, pacifism, democracy

## **PENDAHULUAN**

Jika membayangkan tentang kehidupan universitas di Jepang, yang muncul di pikiran adalah mahasiswa-mahasiswa sopan dengan pakaian rapi yang selalu menyapa dengan ramah. Hal ini sangat berbeda dengan di Indonesia misalnya dimana masih terdapat mahasiswa yang gondrong dan memakai pakaian yang kalah rapi dengan pakaian mahasiswa Jepang. Soal demo pun, mahasiswa di Indonesia terkenal sering melakukan demo dari yang damai hingga anarkis, sementara saya tidak pernah mendengar mahasiswa Jepang melakukan demo. Tetapi ternyata mahasiswa Jepang juga memiliki masa-masa geliat demokrasi dan bahkan mampu melakukan demo yang cenderung anarkis.

Jika melihat ke belakang, Jepang yang saat itu masih sangat bersemangat dalam perang, mengontrol ketat kebebasan untuk mengkritik pemerintah. Sehingga jika ada demo, hal pertama yang dilakukan pemerintah adalah menangkap pendemo. Hal ini mengalami perubahan saat Jepang diduduki oleh Amerika setelah kekalahan Jepang di dalam Perang Dunia II. Amerika yang ingin menerapkan demokrasi, membuat rakyat Jepang mulai memiliki andil dalam pemerintahan. Sehingga geliat demokrasi tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa tetapi juga mayoritas masyarakat Jepang. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya gerakan massa pada masa itu di berbagai kalangan masyarakat mulai dari mahasiswa, kaum buruh, hingga wanita.

Tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana awal kemunculan gerakan massa di Jepang, serta alasan mengapa masyarakat Jepang melakukan aksi tersebut. Selain itu, akan dibahas pula golongan apa saja yang terlibat dalam gerakan massa di Jepang pada tahun 1945-1970an. Penelitian ini akan terbatas pada kisaran tahun tersebut, dikarenakan pada periode itulah gerakan massa sedang giat-giatnya dilakukan oleh masyarakat Jepang.

Di awal, artikel ini akan membahas mengenai latar belakang Jepang pada saat itu yang sedang mengalami kekalahan pada Perang Dunia II, kemudian bagaimana hal ini memicu Jepang untuk mengenal demokrasi dan memulai gerakan massanya hingga banyak golongan masyarakat akhirnya ikut dalam gerakan tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yaitu metode yang digunakan untuk merekonstruksi peristiwa pada masa lampau. Penelitian ini saya lakukan dengan mengumpulkan data kualitatif dari koran yang relevan, dalam hal ini saya menggunakan koran kampus Rikkyo tahun 1954-1967 dimana di tahun itu gerakan massa sedang mencapai titik puncaknya. Kemudian saya juga mengumpulkan beberapa penelitian yang relevan dalam bentuk buku dan jurnal yang nantinya akan digunakan sebagai informasi sejarah

## **KEKALAHAN JEPANG DAN PENDUDUKAN AMERIKA**

Tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II kemudian “diduduki” oleh Amerika. Kehancuran yang merupakan dampak Perang Dunia II terjadi dimana-mana di Jepang. Banyak orang Jepang yang masih tertinggal di negara lain harus di repatriasi. Kekalahan Jepang bukan hanya memporak-porandakan Jepang tetapi juga mengubah arah tujuan Jepang. Kekalahan ini dinilai merupakan “pembukaan kedua” Jepang setelah pembukaan pertama yang telah dilakukan oleh Komandan Matthew Perry saat

membuka paksa Jepang dari keadaan sakoku (鎖国)nya. Pada pembukaan kedua ini, Jepang mengubah haluannya dengan menolak kekuatan militer dan memusatkan perhatiannya pada perekonomian (Fukutake 1988). Hal senada juga dilontarkan Beasley di mana kekalahan Jepang pada saat itu mengubah arah Jepang bukan memulai sebuah awal yang baru (Beasley 2003).

Pendudukan Amerika memang menimbulkan banyak perubahan dalam pemerintahan dan arah Jepang. Tetapi, sebelum itu terjadi ternyata Jepang telah lebih dulu melakukan retrospeksi diri. Dikutip dari Pedang Samurai dan Bunga Seruni, lima hari setelah Hari-VJ (hari kekalahan Jepang yang oleh Amerika di sebut Victory in Japan disingkat VJ), sebelum seorang Amerika pun mendarat di Jepang, beberapa surat kabar besar di Jepang sudah bisa berbicara tentang kekalahan dan perubahan politik pasca kekalahan. Salah satunya, Mainichi Shinbun yang menulis “Tetapi, semuanya itu adalah demi kebaikan dan akhirnya demi keselamatan Jepang” yang menyatakan bahwa Jepang sadar bahwa dirinya telah dikalahkan (Benedict 1982). Tajuk rencananya pun menekankan hal ini serta renungan bahwa usaha Jepang untuk membangun negaranya melalui kekuatan militer gagal, sehingga mereka mulai sekarang harus menyusuri jalan bangsa yang mencintai perdamaian (Ibid 1982).

Sejarawan Wada Haruki (dalam Yamamoto 2004:13) menyebutkan bahwa perubahan pemikiran mengenai perang pada media dan kaum intelektual di Jepang dipicu oleh Pidato Kaisar Jepang pada tanggal 4 September 1945 pada saat pembukaan Diet (Kokkai/国会), yang menyerukan agar membangun Jepang menjadi “negara yang damai”. Sehingga pengaruh Kaisar masih belum sepenuhnya lepas dari masyarakat Jepang.

Amerika menduduki Jepang pada tahun 1945 sampai 1952 yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur dengan jabatan SCAP (Supreme Commander for the Allied Power) atau Panglima Tertinggi Sekutu. Dalam pidatonya pada upacara penyerahan resmi di atas USS Missouri, ia menyatakan kekecewaannya pada Jepang yang telah menggunakan “pengetahuan dan pencerahan” yang telah mereka dapatkan dari Komodor Perry sebagai instrumen untuk penindasan dan perbudakan manusia, serta menyatakan tujuan dari pendudukan Amerika adalah untuk menyelesaikan misi Komodor Perry dengan melakukan demiliterisasi dan pengaplikasian demokrasi di Jepang (Caprio dan Sugita 2007:3). Pendudukan terhadap Jepang ini berbeda dengan sebelumnya yang terjadi pada Jerman yang kalah pada saat Perang Dunia I. Jerman tidak diduduki oleh Amerika tetapi dipaksa membayar \$33 Miliar biaya perbaikan (Ibid 2007:4). Tetapi setelahnya Jerman “tidak kapok” dan kembali berperang pada Perang Dunia II. Sehingga pada saat Perang Dunia II, Amerika belajar dari pengalamannya dan melakukan percobaan baru ter-

hadap Jepang dengan melakukan pendudukan (Ibid 2007). Hal ini pulalah yang membuat pengaruh Amerika sangat kental di Jepang.

Hal yang pertama dilakukan pada saat pendudukan adalah melakukan “pembersihan” dalam pemerintahan, politik, pendidikan, dan media dari orang-orang yang sebelumnya terlibat dalam propaganda perang. Salah satu yang dianggap menjadi kekeliruan Jepang adalah tidak adanya demokrasi di Jepang, dan untuk itulah Amerika menerapkan demokrasi agar Jepang dapat diterima oleh anggota masyarakat dunia (Beasley 2003). Langkah-langkah yang diambil oleh Amerika mencakup melarang ideologi “militer dan ultranasionalis” di sekolah-sekolah di Jepang pada tahun 1945 dan menolak konsep raja Jepang keturunan dewa pada tahun 1946. Persiapan rancangan pertama kali dipercayakan kepada Jepang namun Amerika yang tidak puas mengambil alih persiapan rancangan itu dan mengumumkannya pada tahun 1946 yang kemudian disahkan pada tahun 1947. Dua pasal dalam konstitusi itu ditolak oleh kaum konservatif, yang pertama adalah pasal 1-8 yang menjelaskan mengenai Kaisar sebagai lambang negara yang berdasarkan kehendak rakyat.

Kaum konservatif tidak ingin kaisar yang sedari dulu dianggap arahitogami (現人神) yaitu kami (神)<sup>1</sup> yang berwujud manusia sehingga pemerintahnya adalah kewajiban yang harus dilakukan, diturunkan “derajat kepentingannya” menjadi manusia biasa, simbol negara Jepang. Kata simbol (shocho/象徴) sendiri belum umum diketahui oleh masyarakat Jepang, karena itulah MacArthur menjelaskan makna simbol dalam pasal tersebut adalah bahwa kaisar tidak ada kaitannya dengan urusan di luar kerajaan (Berkofsky 2012). Ini adalah harga yang harus dibayar oleh kaisar beserta keluarganya agar mendapatkan imunitas dari hukuman penjahat perang. Perubahan pasal tersebut membawa dampak besar bagi kebebasan berbicara di Jepang. Pasal mengenai Kaisar diatur dalam Pasal 1-8 sebagai berikut:

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

Pasal 1. Kaisar akan menjadi simbol negara dan dengan persatuan rakyat, memperoleh posisinya dari keinginan rakyat sebagai kekuatan kedaulatan

第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

<sup>1</sup> Istilah kami sering diterjemahkan menjadi dewa. Namun hal ini tidak bisa serta-merta dilakukan karena kami bagi orang Jepang merujuk pada penghuni surga dan neraka yang memiliki kekuatan tertentu dan makhluk yang mendiami kuil-kuil yang mereka sembah.

Pasal 2. Tahta kekaisaran dijalankan dinasti dan diwariskan sesuai dengan Hukum Rumah Kekaisaran yang disahkan oleh Diet

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

Pasal 3. Nasihat dan persetujuan Kabinet dibutuhkan untuk semua tindakan kaisar yang berhubungan dengan negara, dan Kabinet akan bertanggung jawab karenanya.

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

Pasal 4. Kaisar hanya melakukan tindakan menyangkut urusan negara sesuai dengan Konstitusi ini dan tidak memiliki wewenang atas urusan nasional.

天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

Kaisar dapat mendelegasikan tindakan menyangkut urusan negara sebagaimana diatur oleh hukum.

第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

Pasal 5. Ketika, sesuai dengan Hukum Rumah Kekaisaran, seorang wakil ditunjuk, wakil tersebut harus melakukan tindakan menyangkut urusan negara atas nama kaisar. Dalam hal ini, paragraf satu dari pasal ini akan berlaku.

第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

Pasal 6. Kaisar menunjuk Perdana Menteri sebagaimana ditentukan oleh Diet.

天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

Kaisar menunjuk Ketua Hakim Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan oleh Diet.

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

Pasal 7. Kaisar dengan nasihat dan persetujuan Kabinet, akan melakukan tindakan menyangkut urusan negara di bawah ini demi kepentingan rakyat:

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

Diundangkannya amandemen konstitusi, undang-undang, keputusan kabinet dan perjanjian.

二 国会を召集すること。

Konvokasi Diet.

三 衆議院を解散すること。

Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat.

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

Proklamasi pemilihan umum anggota Diet.

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

Pengesahan atas pengangkatan dan pemberhentian Menteri negara dan pejabat lainnya sebagaimana ditentukan oleh hukum, dan dari kekuatan penuh dan kredensial Duta Besar dan Menteri.

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

Pengesahan amnesti umum dan khusus, pergantian hukuman, penangguhan hukuman, dan pemulihan hak.

七 栄典を授与すること。

Pemberian penghargaan.

八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

Pengesahan instrumen ratifikasi dan dokumen diplomatik lainnya sebagaimana ditentukan oleh hukum.

九 外国の大使及び公使を接受すること。

Menerima duta besar dan menteri asing.

十 儀式を行ふこと。

Melakukan fungsi upacara.

第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

Pasal 8. Tidak ada properti yang dapat diberikan kepada, atau diterima oleh Rumah Kekaisaran, juga tidak dapat hadiah dari sana, tanpa izin dari Diet. (Japanese Law Translation. "The Constitution of Japan". [http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail\\_main?id=174](http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=174))

Dari Pasal 1-8 diatas dapat dilihat bagaimana semua tindakan kaisar yang berkaitan dengan urusan kenegaraan harus mendapatkan persetujuan Diet dan Kabinet sehingga kekuasaan tertinggi bukan di tangan kaisar lagi melainkan di tangan Diet. Hal ini paling dominan tercermin pada pasal 4 dimana disebutkan kaisar tidak memiliki kewenangan atas urusan nasional. Jika melihat ke belakang, Konstitusi Meiji yang memuat doktrin bahwa kaisar adalah keturunan kami, membuat kaisar memiliki kekuasaan yang sangat luas, seperti berhak memberi perintah kepada pemimpin angkatan bersenjata; wewenang menghen-tikan atau memperpanjang sidang Diet; hak memilih kabinet dan pejabat tinggi birokrasi;

serta dapat memveto perubahan yang akan terjadi pada pasal-pasal konstitusi (Beasley 2003). Kekuasaan yang sangat luas membuat penguasa dapat mengendalikan kebebasan rakyat untuk mengkritik pemerintahan, misalnya dalam Undang-Undang Pers (1875) dan Undang-Undang Pemeliharaan Ketertiban (1887) yang membuat media dan rakyat tidak dapat mengeluarkan opini yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintahan (Ibid 2003).

Dengan adanya perubahan pada pasal 1 tersebut, dapat dikatakan rakyat, juga sama seperti kaisar dapat menjadi penentu kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Jepang. Sehingga pasal ini merupakan pasal untuk menurunkan cengkraman pemerintah dan membebaskan rakyat untuk turut berfikir mengenai Jepang seperti apa yang mereka inginkan. Sebuah cikal-bakal dari demokrasi yang coba diterapkan oleh Amerika di Jepang.

Pasal kedua yang ditentang oleh kaum konservatif adalah pasal 9 di mana Jepang menolak perang untuk selama-lamanya. Pasal 9 inilah yang kemudian menjadi landasan utama pasifisme Jepang, yang lebih lengkapnya berbunyi sebagai berikut;

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。(Masamune 2018:21)

Rakyat Jepang dengan jujur menginginkan perdamaian internasional, berdasarkan keadilan dan ketertiban, menolak perang sebagai hak negara, dan ancaman atau penggunaan kekuatan militer secara paksa tidak diakui sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan internasional. .

Untuk mencapai tujuan dari paragraf sebelumnya, pasukan darat, pasukan laut dan udara serta pasukan lainnya tidak akan dibina. Hak berperang negara tidak diakui. (Prime Minister and his Cabinet. "Constitution". [http://japan.kantei.go.jp/constitution\\_and\\_government\\_of\\_japan/constitution\\_e.html](http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html))

Pasal 9 tersebut dimaknai dengan, paragraf pertama, yaitu bahwa dengan tujuan untuk perdamaian internasional berdasarkan hukum, rakyat Jepang tidak mengakui perang, ancaman, atau penggunaan persenjataan untuk menyelesaikan permasalahan internasional. Sementara paragraf kedua dimaknai dengan, bahwa untuk mencapai tujuan yang tertuang pada paragraf pertama, Jepang tidak akan melakukan maintain Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta potensi perang lainnya, kemudian hak perang negara tidak akan diakui.

Rikkyo Echo (surat kabar dari Universitas Rikkyo) pada 1964 memuat berita mengenai laporan Dewan Peneliti Konstitusi<sup>2</sup> yang telah meneliti konstitusi selama 8 tahun. Hasil penelitian mereka menyebutkan bahwa Revisi Konstitusi khususnya Pasal 9

<sup>2</sup> Persatuan profesor dan pelajar yang meneliti mengenai konstitusi

mengenai Pasifisme tidak diperlukan. Hal ini juga didukung oleh Asisten Profesor Ikeda Masaaki yang menyebutkan bahwa tidak penting bahwa awalnya Konstitusi tersebut dipaksakan oleh Amerika karena sekarang Jepang telah menjadi negara independen dan Konstitusi tersebut dinilai sesuai dengan keinginan masyarakat Jepang (Rikkyo Echo 1964)

Pasal 9 ini tetap dipertahankan oleh masyarakat Jepang bahkan ketika Amerika berubah tujuan dari melemahkan militerisme Jepang menjadi menstabilkan Jepang dalam segi ekonomi dan politik. Hal yang sering disebut reverse course ini, disebabkan karena pada tahun 1947 Perang Dingin merupakan prioritas Amerika. Di bawah reverse course, ekonomi membaik secara drastis dan Jepang dapat dikatakan telah “bangkit kembali”. Semua itu dilakukan oleh karena Amerika menginginkan kesediaan Jepang untuk membantunya dalam perang terhadap komunisme dan dengan tujuan tersebut, kemudian melakukan red purge yaitu pembersihan dengan cara memecat pegawai pemerintah dan juga buruh yang diduga merupakan pendukung sayap kiri<sup>3</sup>. Tidak hanya itu, Amerika juga membubarkan organisasi yang dianggap pendukung komunis dan di sisi lain mempromosikan organisasi non komunis sebagai gantinya.

Hingga pada tahun 1949, situasi global semakin memanas ketika Cina menjadi Republik Rakyat (beraliran komunis) dan Uni Soviet melakukan tes bom nuklir. Pada 1950 Perang Korea pecah dimana Amerika memihak Korea Selatan dan Soviet memihak Korea Utara. Sebulan setelah Perang Korea pecah, melupakan demokrasi dan perdamaian, PM Yoshida Shigeru melantik Polisi Nasional Cadangan (Kokka Keisatsu Yobitai / 国家警察予備隊)<sup>4</sup> yang terdiri dari 75.000 orang, yang menjadi cikal bakal Agensi Keselamatan Nasional (Hoantai/ 保安隊)<sup>5</sup> pada tahun 1954 dan Pasukan Bela Diri Jepang (Jietai/ 自衛隊)<sup>6</sup> pada tahun 1954 (Sakamoto 2013). Meskipun Perang Korea secara langsung memperbaiki ekonomi Jepang karena Amerika “membeli” hasil industri Jepang untuk dikirimkan ke Perang Korea, namun terdapat masyarakat Jepang yang tidak setuju dengan “keikutsertaan” mereka dalam perang. Sehingga pasal 9 tersebut nantinya akan menjadi salah satu pemicu adanya gerakan massa di Jepang. Karena rakyat Jepang menolak habis-habisan jika pasal tersebut akan dihapuskan. Pada akhirnya reverse course yang dilakukan oleh Amerika menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat Jepang kepada Amerika.

### **Awal Gerakan Massa**

Pada tahun 1951, PM Yoshida Shigeru menandatangani dua perjanjian yang akan menentukan bagaimana arah hubungan Jepang dengan Amerika. Perjanjian yang pertama ditandatangani adalah Perjanjian Perdamaian San Fransisco<sup>7</sup> yang mengembalikan kedaulatan Jepang, mempererat aliansi dengan Amerika dan negara demokratis lainnya namun

<sup>3</sup> Sayap kiri atau beraliran kiri artinya merupakan pendukung komunis

<sup>4</sup> Lebih dikenal dengan National Police Reserve (NPR)

<sup>5</sup> Lebih dikenal dengan National Safety Agency (NSA)

<sup>6</sup> Lebih dikenal dengan Self-Defence Forces (SDF)

<sup>7</sup> Lebih dikenal dengan San Fransisco Peace Treaty

dengan itu pula menempatkan Jepang dalam pihak yang melawan Uni Soviet dalam perang dingin (Tōgō 2010).

Kemudian beberapa jam setelahnya masih pada hari yang sama, Jepang juga menandatangani Perjanjian Keamanan<sup>8</sup> dengan Amerika. Hal ini dikarenakan PM Yoshida sadar bahwa dengan berlakunya pasal 9 mengenai pasifisme Jepang dan dengan keadaan pada saat itu dimana Perang Dingin sedang berlangsung, Jepang mungkin harus mengandalkan Amerika dalam mempertahankan diri. Meskipun begitu, ada anggapan bahwa Perjanjian Keamanan hanyalah usaha Amerika untuk mempertahankan pasukannya di Jepang karena tidak menyatakan dengan jelas bahwa Amerika akan membantu Jepang jika ada negara lain yang menyerang, perjanjian tersebut hanya menyatakan bahwa Amerika akan menempatkan pasukannya di Jepang (Maswood 1990). Oleh karena itu, Perjanjian Keamanan sering dianggap oleh masyarakat Jepang sebagai sesuatu yang tidak perlu.

Pada tahun 1952, meskipun negara Jepang telah kembali berdaulat setelah pendudukan Amerika, Okinawa sebagai akibat dari Perjanjian Keamanan, diambil alih secara administratif oleh Amerika. Okinawa dipilih karena letaknya yang strategis dan mampu menjangkau kota mana saja di Asia dalam waktu singkat. Banyak penduduk Okinawa yang merasa dikhianati; mereka berpikir bahwa Jepang mendorong Amerika untuk tetap menduduki Okinawa (Baker 2004).

Masaru Ichinose, Editor Seni Rikkyo Echo, berkunjung ke Okinawa selama sebulan dan menyaksikan bagaimana kehidupan penduduk Okinawa sangat berbeda dengan di pulau utama. Adanya markas Amerika di Okinawa membuat penduduk Okinawa tidak tenang. Terdapat polusi suara, peluru salah sasaran yang mengenai penduduk, dan perasaan diskriminasi yang dirasakan oleh penduduk Okinawa karena tingkat kriminalitas dan kemiskinan yang tinggi. Namun, penduduk Okinawa masih ingin tinggal di Okinawa dan untuk itu menuntut pemerintah Jepang untuk “mengembalikan Okinawa kepada Jepang” (Rikkyo Echo 1965). Hingga pada tanggal 20 November 1967, penduduk Okinawa melakukan protes di Kota Naha karena janji pemerintah untuk mengembalikan hak administratif Okinawa kepada Jepang masih belum terlaksana (Rikkyo Echo 1967).

Pada saat pendudukan Amerika, asosiasi dunia World Peace Council memicu terbentuknya Komite Perdamaian Jepang (Nihon Heiwa Iinkai/日本平和委員会)<sup>9</sup> yang mengampanyekan Stockholm Appeal melawan senjata nuklir. Kemudian pada tahun 1940-an, terbentuk juga Kelompok Kajian Perdamaian (Heiwa Mondai Danwankai/平和問題談話会)<sup>10</sup> yang mendapat dukungan dari partai sosialis yang mendeklarasikan empat prinsip untuk mengakhiri pendudukan: perjanjian perdamaian yang komprehensif dengan semua pihak yang dirugikan, menolak markas militer asing, langkah diplomatis yang tidak memihak, dan tidak ada remilitarisasi<sup>11</sup> (Orr 2002). Tidak hanya itu saja, rakyat Jepang juga membuat beberapa gerakan perdamaian yang diikuti oleh semua kalangan dari aktivis dan kaum intelektual sayap kiri dan liberal hingga ibu rumah tangga. Tujuan gerakan-gerakan perdamaian ini biasanya untuk menolak remilitarisasi Jepang, konstitusi SDF, Perjanjian Keamanan US dan pembaruannya, serta ekspansi markas militer US di Jepang (Ibid 2002).

Salah satu kelompok gerakan perdamaian yang terbentuk adalah Wadatsumi-kai (わたつみ会). Wadatsumi-kai merupakan kelompok yang menerbitkan surat-surat serta buku harian dari pemuda Universitas Tokyo yang meninggal pada masa perang (Moore 2016). Kumpulan cerita tersebut kemudian selanjutnya diberi judul Kike Wadatsumi no Koe (聞けわた

<sup>8</sup> Lebih dikenal dengan San Fransisco Peace Treaty

<sup>9</sup> Lebih dikenal dengan Security Treaty

<sup>10</sup> Lebih dikenal dengan Japan Peace Committee

<sup>11</sup> Lebih dikenal dengan The Peace Study Group Istilah ini sering digunakan untuk menyebut kemungkinan Jepang akan menjadi negara militer kembali padahal Jepang sebelumnya mendeklarasikan diri sebagai negara pasifis alias anti-perang.

つみの声) dan juga menjadi nama kelompok tersebut. Kelompok ini terbatas pada mahasiswa Universitas Tokyo tetapi kemudian menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok lainnya. Salah satunya Universitas Rikkyo yang menyebutkan bahwa Waseda juga melakukan aksi teatral Wadatsumi-kai.

Selain menerbitkan buku harian seperti yang dilakukan oleh Wadatsumi-kai, para mahasiswa dari berbagai universitas di Jepang tersebut juga membuat organisasi bantuan yang menyediakan makanan, pakaian, dan buku murah ketika harga-harga di pasaran naik setelah perang berakhir (Matsunami 1970). Gerakan gabungan seluruh mahasiswa ini dipicu oleh Universitas Mito (sekarang disebut Universitas Ibaraki) yang menentang kepala sekolah mereka karena membuat peraturan yang membatasi profesor progresif dan mengambil kontrol asrama dari mahasiswa. Para mahasiswa Universitas Mito tersebut kemudian melakukan protes dengan cara mengurung diri di salah satu asrama hingga kepala sekolahnya diganti (Ibid 1970).

Protes ini kemudian diikuti oleh berbagai universitas di Jepang baik universitas negeri maupun swasta dan kemudian disatukan di bawah payung Partai Komunis Jepang yang bernama Aliansi Pemuda Komunis Jepang. Aliansi Pemuda Komunis Jepang kemudian mengadakan rapat besar yang dihadiri oleh 300 perwakilan dari 113 sekolah pemerintah dan universitas untuk memprotes kenaikan biaya sekolah dan mempresentasikan diri sebagai Federasi Mahasiswa Seluruh Jepang (Zen Nihon Gakusei Jichikai Sorengo/全日本学生自治会総連合) yang disingkat menjadi Zengakuren (全学連) (Ibid 1970).

Meskipun awalnya mereka melawan sistem pendidikan, mereka juga melakukan protes terhadap Amerika dan remilitarisasi serta mendukung pasifisme. Dalam salah satu pamflet dan buku berjudul Waga tomoni tsugen (わが友につげん), mereka memprotes Perang Korea dengan slogan “Pemuda jangan bersenjata! Pekerja jangan buat senjata!” mereka juga menginginkan agar Perjanjian Perdamaian segera ditandatangani agar Jepang kembali berdiri sendiri sebagai negara berdaulat tanpa bantuan Amerika (Hasegawa 2018)

Selain hal tersebut, terdapat juga mahasiswa yang melakukan rapat untuk mendiskusikan perdamaian. Dilansir dari Koran Universitas Rikkyo, Universitas Rikkyo telah selesai mengikuti rapat perdamaian mengenai penolakan fasisme. Karena Universitas Rikkyo merupakan universitas kristen, maka yang diundang adalah beberapa perwakilan mahasiswa dari UNESCO, YMCA, Wadatsumi-kai, dan juga kelompok mahasiswa Kristen (Rikkyo Daigaku Shinbun 1954) Hal ini dapat menjadi salah satu contoh bagaimana gerakan perdamaian tersebar.

Zengakuren meskipun di mata masyarakat Jepang pada saat itu sangat erat kaitannya dengan Partai Komunis Jepang, Pada kenyataannya di dalam Zengakuren sendiri terdapat 3 kubu yang dominan, yaitu Minsei Zengakuren (民青全学連) (yang diikuti oleh sebagian besar mahasiswa universitas negeri maupun swasta), Sanpa Zengakuren (三派全学連) (yang diikuti oleh sebagian besar mahasiswa universitas swasta di Tokyo), dan Kakumaru Zengakuren (革マル全学連) (yang diikuti oleh sebagian kecil mahasiswa universitas swasta) (Rikkyo Echo 1967). Diantara ketiga kubu ini, hanya Minsei Zengakuren yang tidak beraliran Kiri. Kubu-kubu ini juga menyebabkan berbedanya pendapat mengenai Zengakuren diantara mahasiswa, ada yang melihat Zengakuren sebagai alat politik tetapi ada juga yang berkata bahwa Zengakuren diperlukan untuk melindungi ideologi mahasiswa.

Keterkaitan Zengakuren dengan Partai Komunis Jepang, membuat mereka juga tidak bisa dipisahkan dengan gerakan buruh pada masa itu. Saat perang berlangsung organisasi buruh dilarang dibentuk selama hampir 10 tahun, sehingga saat perang berakhir dan SCAP menyarankan untuk membentuk serikat buruh, mereka kebingungan. Terdapat dua organ-

isasi buruh besar pada masa itu, yaitu Sanbetsu (産別) dan Sodomei (総同盟). Masa kejayaan Sanbetsu hanya sebentar karena mereka membiarkan JCP untuk membajak agenda kebijakan organisasi dan memberikan prioritas pada tujuan JCP, sementara Sodomei terpecah oleh masalah internal antara kubu sayap kiri dan sayap kanan. Perpecahan tersebut menghasilkan serikat Sanbetsu Mindo/産別民同 dan untuk Sodomei para buruh muda lebih tertarik dengan gaya aktivitas serikat yang lebih agresif serta revolusi damai ala sayap kiri yang dipimpin Takano Minoru (Yamamoto 2004).

Sementara itu, paham komunis yang dianut oleh serikat buruh kemudian membawa bumerang dengan adanya Red Purge yang membuat runtuhnya organisasi buruh sayap kiri. Hal itu membuat dibentuknya Sohyo singkatan dari Nihon Rodo Kumiai Sohyogikai (日本労働組合総連合会) yang dibantu oleh campur tangan SCAP yang menginginkan serikat buruh yang demokratis pada tahun 1947 (Gibbs 2002). Dibawah kepemimpinan Takano Minoru, awalnya Sohyo mendukung Amerika pada saat Perang Korea, namun mereka kemudian membuat SCAP kecewa dengan berbalik ke sayap kiri dan menentang Perjanjian Perdamaian dan Keamanan serta tes nuklir (Ibid 2002). Takano juga berusaha untuk mengajak para buruh melakukan gerakan perdamaian, salah satu ujarannya adalah, "Jika serikat buruh memelopori gerakan perdamaian dan anti-nuklir, maka mereka tidak akan lagi terisolasi dan akan bisa bertarung bersama petani dan warga." (Yamamoto 2004:61).

Organisasi lain yang berpengaruh dalam gerakan pasifisme adalah organisasi wanita. Berkembangnya organisasi wanita pasca perang juga dipicu oleh penghapusan undang-undang polisi keamanan yang melarang perempuan dan anak di bawah umur menghadiri demonstrasi politik atau bergabung dengan partai politik, dan Diet Jepang menyetujui hak pilih perempuan pada bulan Desember 1945, yang memungkinkan perempuan untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan anggota Diet pasca perang pertama di Jepang pada 10 April 1946 (Ibid 2004).

Namun, sebelum itu, sebenarnya organisasi wanita telah mulai terbentuk. Organisasi wanita yang paling signifikan adalah Perkumpulan Wanita untuk Pertahanan Nasional (Kokubo Fujinkai/国防婦人会). Tetapi organisasi ini merupakan organisasi pro-perang yang melakukan kerja sukarelawan untuk membantu korban perang dalam hal bantuan materil maupun moril. Pada masa tersebut, perempuan yang mengikuti Kokubo Fujinkai merasa bebas dan berguna karena diizinkan keluar dari rumah untuk sesuatu yang berguna bagi pemerintahan (Yamamoto 2004). Tetapi, setelah perang, wanita-wanita ini tersadar saat menyadari perasaan lembut mereka terhadap tentara yang mereka kasihani telah dieksploitasi dan bahwa mereka telah membantu mengirim begitu banyak orang ke medan perang. Tindakan mereka yang bermaksud baik telah memberikan tekanan moral pada pria untuk melaksanakan tugas mereka dengan gagah berani meskipun dalam ketakutan (Ibid 2004). Sehingga setelah kekalahan Jepang, perempuan mengingat perang sebagai penderitaan terutama karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai dan bagaimana mereka merasa turut andil dalam kematian prajurit-prajurit di medan perang.

Gerakan pasifisme semakin tidak terbendung ketika pada tahun 1954 Amerika melakukan tes bom hidrogen di pulau karang Bikini. Kekuatan bom tersebut bahkan lebih besar dibandingkan dengan bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Hal ini memicu

gerakan anti bom yang dilakukan oleh wanita yang terdiri dari kalangan guru, ibu rumah tangga dan kalangan wanita dari sayap kiri.

### **Anti Anpo dan Perang Vietnam**

Tahun 1960 merupakan tahun Jepang bergejolak, demo besar-besaran terjadi dan diikuti oleh ribuan orang dari beragam kelompok untuk melawan perubahan Perjanjian Keamanan. Hal itu terjadi bukan tanpa alasan, sejak tahun 1949 ketika awal pendudukan Amerika, telah terjadi beberapa insiden yang erat kaitannya dengan usaha Amerika untuk mendirikan markas militer. Hal ini memicu berbagai macam protes masyarakat Jepang.

Awalnya pada tahun 1949, nelayan di Kujukurihama, melakukan protes terhadap tentara Amerika yang melakukan latihan tembak dan mengganggu ketentraman masyarakat sekitar markas Amerika dan hasilnya adalah hukuman berupa pekerjaan kasar dari pengadilan Amerika (Koschmann 2002). Protes terhadap Amerika kemudian semakin banyak terjadi seiring ditandatanganinya Perjanjian Keamanan di San Fransisco pada tahun 1951 yang membuat Amerika diberikan hak untuk mendirikan markas di Okinawa. Pada tahun 1952-1975 terdapat gerakan untuk menolak pengambil-alihan lahan di desa Uchinada untuk tempat latihan menembak Amerika yang akhirnya berhasil membuat lahan tersebut dikembalikan kepada penduduk desa (Ibid 2002).

Terdapat juga insiden yang terjadi di dekat Gunung Fuji, melibatkan petani yang menolak penggunaan lahan bekas latihan tentara Jepang oleh tentara Amerika. Penolakan ini dilakukan dengan cara meminta pengembalian tanah dan melakukan protes dengan duduk di tempat latihan menembak yang dilakukan oleh anggota Kelompok Ibu Desa Shibano (Ibid 2002). Kemudian di Sunagawa, masyarakat mendemo perluasan hanggar Angkatan Udara Amerika. Insiden ini mengakibatkan ditangkapnya 25 orang pendemo yang diadili pada tahun 1957 untuk pengrusakan pagar, dan 7 orang dinyatakan bersalah (Ibid 2002). Namun, pada tahun 1959, pengadilan Tokyo menyatakan mereka tidak bersalah yang akhirnya dibalik lagi menjadi bersalah oleh Mahkamah Agung.

Kejadian-kejadian ini terutama insiden di Sunagawa membuat momentum untuk gerakan dan kelompok pendukung pasifisme untuk maju dan melawan adanya markas militer Amerika di Jepang yang akhirnya memicu gerakan anti Anpo pada tahun 1960. Gerakan dan kelompok ini terdiri dari petani, nelayan, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan penduduk yang merasa dirugikan oleh keberadaan markas Amerika.

Wacana tentang revisi Perjanjian Keamanan sebenarnya telah ada sejak tahun 1955, ketika Shigemitsu mengajukan proposal Anpo yang baru dengan konsep “persamaan” dimana ia mengajukan untuk meningkatkan kekuatan militer Jepang, sebagai gantinya Jepang akan mengirim pasukan untuk membantu Amerika jika dibutuhkan, namun usul ini ditolak oleh Dulles. Usaha Shigemitsu kemudian diteruskan oleh Kishi Nobusuke pada tahun 1957 saat dia mengunjungi Amerika dan ditanggapi dengan lebih baik oleh Amerika. Sama dengan Shigemitsu, ia mengajukan proposal dengan membawa slogan “Era Baru Hubungan Amerika-Jepang”, yang secara spesifik ingin mengubah pasal 2 Perjanjian Keamanan mengenai Jepang yang harus berkonsultasi dahulu dengan Amerika sebelum mengirimkan atau menambah pasukan dan mengenai batas waktu berlakunya (Sakamoto 2013). Dengan itu juga ia mengambil resiko menghadapi kritik dari dalam negeri karena revisi Perjanjian Keamanan mempunyai tujuan lebih besar yaitu untuk merevisi pasal 9 konstitusi mengenai perdamaian.

Disisi lain, Amerika memikirkan tentang protes di Okinawa dan bagaimana sentimen masyarakat terhadap Amerika hingga membuat tokoh anti-Amerika menduduki posisi pemerintah (Ibid 2013). Hal inilah yang membuat Amerika merasa Perjanjian Keamanan memang harus dibuat menjadi Perjanjian Kerja Sama atau nantinya bernama *Nihon-koku to Amerika-gasshukoku to no Aida no Sogo Kyoryoku oyobi Anzen Hoshō*

Joyaku (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約) biasa disingkat Anpo (安保) agar dapat mengembalikan hak administratif Okinawa kepada Jepang. Ketika pihak Jepang dan Amerika telah mencapai kesepakatan yang sama mengenai Anpo pada 1958, jumlah masyarakat yang menolak juga semakin meningkat. Masyarakat Jepang khawatir dengan adanya Anpo akan membuat Jepang kembali dipersenjatai dan harus ikut membantu Amerika dalam Perang Dingin.

Pada tahun 1959, terbentuk koalisi dari 134 kelompok yang bernama Komite Masyarakat untuk Menghentikan Revisi Perjanjian Keamanan, terdiri dari Partai Sosialis dan Komunis, serikat buruh, kelompok yang menolak persenjataan kembali, organisasi yang membela konstitusi, penduduk dan pekerja yang khawatir dengan keberadaan markas Amerika, Asosiasi Persahabatan China, kelompok perempuan, kelompok mahasiswa dan pengacara hak kaum minoritas (Sasaki-uemura 2002). Mereka semua berkumpul untuk kepentingan yang sama yaitu menolak Anpo, menolak markas Amerika, dan mempertahankan konstitusi sebagaimana adanya. Komite masyarakat kemudian mengoordinir serangkaian aksi protes pada tahun 1960 yang terdiri dari penandatanganan petisi dan berbagai cara demo yang melibatkan sekitar 16 juta orang (Ibid 2002).

Kishi sendiri tetap menjalankan rencananya meski suara dalam kabinetnya telah terpecah. Ketika itu partai oposisi menahan Anpo. Sementara itu, Kishi ingin mengusahakan agar Anpo dapat diratifikasi tanpa harus menunggu persetujuan Majelis Tinggi agar siap saat kunjungan Presiden Eisenhower. Dengan tujuan itu, ia memperpanjang sesi rapat Diet selama sebulan dan memaksa agar Diet menyetujuinya pada tanggal 19 Mei (Ibid 2002). Keputusan ini diambil secara sepihak tanpa mempertimbangkan penolakan dari Partai Sosialis, Kishi bahkan mengusir Partai Sosialis menggunakan polisi huru-hara agar mendapatkan suara bulat.

Sementara rapat Diet, di luar sana, kematian Kanba Michiko, seorang mahasiswa Universitas Tokyo pada tanggal 15 Juni 1960, menjadi simbol mahasiswa yang mati dengan mempertahankan ideologi dan sebuah harga yang harus dibayar untuk melawan negara. Kematian Kanba Michiko diakibatkan oleh cekikan yang biasa dilakukan oleh polisi untuk menyingkirkan pendemo (Shigematsu 2012). Meskipun demo yang berlangsung sangat besar dan anarkis hingga Kishi harus membatalkan kunjungan Presiden Eisenhower. Namun, hal ini tidak mampu membatalkan ratifikasi Anpo yang dilakukan secara paksa oleh Kishi dan pemberlakuannya pada tanggal 18 Juni 1960.

Meskipun namanya diganti menjadi Perjanjian Kerja Sama, dari segi esensi dan strukturnya tidak jauh berbeda dari Perjanjian Keamanan. Jepang masih menyediakan markas untuk Amerika di Jepang untuk tetap melindungi Jepang dan Jepang tidak berkewajiban untuk mengirim tentara keluar untuk membantu Amerika (Sakamoto 2013). Dalam hal ini, yang ditekankan oleh Anpo adalah wilayah pertahanan gabungan Jepang-Amerika dimana mereka seolah-olah menghadapi musuh yang sama (Ibid 2013). Keputusan ini dipilih agar Jepang tidak harus mengubah Konstitusinya terutama Pasal 9 tentang pasifisme yang akan menimbulkan penolakan keras dari masyarakat Jepang. Meskipun berlakunya Anpo berarti kekalahan demonstran, namun mereka berhasil membuat Kishi mengundurkan diri pada tanggal 23 Juni, sekaligus membuat pemerintah lebih menyadari bagaimana peran gerakan dan kelompok masyarakat sebagai agen perubahan dan sesuatu yang harus diwaspadai.

Dari tahun 1960an, masyarakat dihadapkan lagi dengan peran Jepang yang membantu Amerika dalam perangnya dengan Vietnam, yang memicu gerakan anti-Vietnam. Kelompok yang paling keras memberikan kritik adalah kelompok Kiri Baru yang menilai imperialisme Amerika di Asia yang ditunjukkannya lewat Perang Korea, Perang Vietnam, dan bagaimana Amerika tetap mempertahankan markasnya di Okinawa tidak sesuai dengan visi negara Jepang yang berusaha berdiri sendiri tanpa mengikuti perang negara

lain (Shigematsu 2012). Segera setelah Amerika membom Vietnam Utara pada tahun 1965, sebuah kelompok yang terdiri dari kaum intelektual dan artis yang berpusat pada penulis Makoto Oda melakukan protes melawan perang Vietnam yang bernama Betonamu ni Heiwa wo! Shimin Rengo (ベトナムに平和を市民連合) atau biasa disebut Beheiren (ベ平連).

Kelompok ini memelopori organisasi politik yang ingin menstimulasi perubahan sosial tanpa harus membawa ideologi politik seperti gerakan-gerakan yang ada sebelumnya. Oleh karena itu, mereka menghindari pemimpin sentral dan bergerak melalui individual atau golongan yang menggunakan logo Beheiren dan membebaskan pengikutnya untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan Beheiren selama mereka tidak keluar dari tiga prinsip perdamaian Vietnam (Orr 2002). Tiga prinsip itu adalah “Perdamaian untuk Vietnam,” “Vietnam untuk Rakyat Vietnam,” dan “Tolak Pemerintah Jepang Terlibat Perang Vietnam” (Shigematsu 2012). Tidak seperti gerakan yang muncul sebelumnya, Beheiren menekankan pada pentingnya gerakan yang fleksibel dan melalui cara-cara yang tidak anarkis dan cenderung progresif, seperti menunjukkan bagaimana ekonomi Jepang sebenarnya disokong dengan adanya perang dan dengan slogan “Vietnam di dalam diri kita” mereka menunjukkan bagaimana posisi masyarakat dalam kompleksitas sistem (Ibid 2012). Mereka juga mempublikasikan selebaran, membeli iklan sebesar satu halaman penuh pada koran Amerika, dan memberikan dukungan kepada tentara Amerika yang lari dari perang sebelum akhirnya dibubarkan pada tahun 1974 (Orr 2002).

Tetapi tidak hanya dengan cara halus, terdapat juga kelompok lain yang melakukan aksi anarkis sebagai bentuk penolakan mereka terhadap perang Vietnam. Salah satunya adalah kelompok Sanpaku Zengakuren dan Kakumaru Zengakuren yang memprotes kunjungan PM Eisaku Sato ke Vietnam pada 8 Oktober 1967 yang mengacuhkan opini publik bahwa Jepang tidak boleh terlibat dalam Perang Vietnam. Insiden ini terjadi di Bandara Haneda dan bentrok yang terjadi dengan polisi mengakibatkan 75 mahasiswa dan 600 polisi terluka (Rikkyo Echo 1967).

Di sisi lain, di saat yang hampir bersamaan terdapat protes melawan pembangunan bandara Narita pada tahun 1962. Rencana pembangunan bandara Narita ini dilakukan untuk mengatasi kepadatan yang terjadi di bandara Haneda dikarenakan terjadi kenaikan jumlah pesawat militer yang diakibatkan oleh Perang Vietnam, karena untuk memperluas bandara Haneda akan memakan banyak biaya. Petani yang berada di sekitar desa Sanrizuka dan Shibayama kemudian merasa tidak dihargai karena agen pemerintah yang berkunjung untuk membeli tanah mereka langsung menentukan harga dengan rendah tanpa melakukan konsensus pembangunan dan kompromi (nemawashi/根回し) (Perez 2013). Di tengah kemelut ini, aktivis Kiri Baru mulai membantu para petani dan meskipun gerakan anti-Narita tetap dipimpin oleh petani, namun jumlah aktivis Kiri Baru lebih banyak.

Kelompok Kiri Baru yang pertama kali bergabung dalam protes adalah Minsei (民生) yang merupakan anak cabang dari JCP (Yasko 2002). Tetapi koalisi ini tidak bertahan lama dikarenakan Minsei tidak setuju para petani dan penduduk menggunakan cara anarkis dalam melakukan protesnya. Penduduk yang merasa keberatan melarang mereka untuk ikut dalam aksi protes dan meminta Zengakuren untuk menggantikan mereka (Ibid 2002). Selain Zengakuren, salah satu kelompok yang dominan dalam anti Narita adalah (Chukakuha / 中核派). Chukakuha mengumumkan bahwa mereka telah menemukan bahwa alasan sebenarnya dari pembangunan bandara ini adalah untuk menyediakan fasilitas baru untuk Amerika yang akan digunakannya untuk melawan RRC dan Uni Soviet (Perez 2013). Berbagai kelompok ini kemudian bergabung menjadi Kelompok Sanrizuka-Shibayama Melawan Bandara (三里塚芝山連合空港反対同盟) melakukan protes dengan cara kekerasan dan dibalas dengan cara serupa oleh polisi. Aksi protes ini juga melibatkan masyarakat yang menolak Perang Vietnam.

Pada tahun 1971 ketika pemerintah dengan paksa melakukan pengambil alihan lahan dan petani tetap bertahan dengan cara merantai diri mereka ke rumah mereka. Sekitar 300 petani ditangkap dan terjadi bentrok antara pendemo dengan polisi (Ibid 2013). Para aktivis anti-Narita masih belum menyerah dan membangun menara besi di tengah-tengah jalur lepas landas yang berdiri hingga tahun 1977 (Yasko 2002). Mereka juga melakukan serangkaian aksi menyabotase transportasi bahan bakar pesawat dan merusak pipa air serta peralatan lainnya. Hingga pada tahun 1978 ketika bandara Narita rencana diresmikan (Ibid 2002). Dari berbagai macam aksi yang dilakukan masyarakat Jepang pada masa itu, yang menjadi inti penolakan mereka adalah adanya markas Amerika di Jepang, kekhawatiran masyarakat jika Jepang dipersenjatai kembali dan penolakan masyarakat Jepang terhadap perang.

## **KESIMPULAN**

Gerakan massa di Jepang diawali dari kekalahan Jepang di Perang Dunia II kemudian dipicu oleh semakin bebasnya rakyat melakukan kritik kepada pemerintahan sebagai akibat kaisar diturunkan derajat kepentingannya menjadi simbol negara dan dengan itu pula membatasi kontrolnya akan pemerintahan. Ditambah lagi dengan Amerika yang melakukan pembersihan besar-besaran terhadap propaganda perang pemerintah Jepang serta memasukkan pasal mengenai pasifisme dalam konstitusi Jepang, yaitu pada pasal 9 dengan tujuan untuk melemahkan sikap militerisme Jepang. Sikap pasifisme Jepang tidak hanya karena Amerika, tetapi juga karena rakyat Jepang menyetujuinya.

Tetapi seiring waktu, Amerika malah mengubah tujuan dari melemahkan militer menjadi menstabilkan Jepang dalam segi ekonomi dan politik agar Jepang dapat membantunya dalam perang. Masyarakat Jepang kemudian melakukan berbagai gerakan massa untuk menentang keikutsertaan Jepang dalam perang serta berkeinginan agar Amerika tidak menaruh markas di Jepang. Hal ini ironisnya tidak sesuai dengan keinginan Amerika karena semakin Amerika menekan Jepang untuk menanggalkan pasifismenya, masyarakat Jepang semakin membenci perang dan Amerika serta menolak perang mati-matian dengan cara melakukan demo besar-besaran.

Gerakan massa ini kemudian tiba-tiba meredup di tahun 2000an. Hingga pada tahun 2018, PM Shinzo Abe mengumumkan bahwa ia ingin merevisi Pasal 9 dengan menambahkan pasal ketiga mengenai SDF agar SDF mendapatkan status legal dalam hukum. Namun, hal ini mendapat kritik dari kalangan cendekiawan karena mereka berpikir bahwa jika penambahan pasal dilakukan, malah akan membuat cakupan kegiatan SDF semakin luas. Oleh karena itu masyarakat Jepang kemudian kembali seperti sebelumnya, melakukan protes besar-besaran. Sebanyak 18,000 orang tergabung dalam protes di depan gedung Diet ini, salah satunya yang bernama. Apakah akhirnya pasal 9 ini akan direvisi atau tidak, keputusannya ada di rakyat Jepang sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku, Artikel, Jurnal**

Baker, Anni P. *American Soldiers Overseas: The Global Military Presence*. Westport: Praeger, 2004.

Beasley, William Gerald. *Pengalaman Jepang*. Jakarta: Yayasan Obor, 2003.

Berkofsky, Axel. *A Pacifist Constitution for an Armed Empire: Past and Present of the Japanese Security and Defence Policies*. Italia: FrancoAngeli, 2012.

Caprio, Mark E., dan Yoneyuki Sugita. *Democracy in Occupied Japan The U.s. Occupation and Japanese Politics and Society*. Abingdon: Routledge, 2007.

- Fukutake, Tadashi. *Masyarakat Jepang Dewasa Ini*. Jakarta: PT. Gramedia, 1988.
- Gibbs, Michael. "Sohyo" dalam *Encyclopedia of Contemporary Japanese Culture*, Sandra Buckley (edt.). New York: Routledge, 2002.
- Hasegawa, Kenji. *Student Radicalism and the Formation of Postwar Japan*. Singapore: Palgrave Macmillan, 2018.
- Ishida, Takeshi, and Ellis Krauss. *Democracy in Japan*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1990.
- Koschmann, J. Victor. "Anti-U.S Base" dalam *Encyclopedia of Contemporary Japanese Culture*, Sandra Buckley (edt.). New York: Routledge, 2002.
- Maswood, Syed Javed. *Japanese Defence: The Search for Political Power*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1990.
- Matsunami, Michihiro. "Origins of Zengakuren", dalam *Zengakuren*, Stuart J. Dowsey (edt.). Tokyo: Ishii Press, 1970.
- Moore, Aaron William. "Pluralism and Problem with Collective Memory: Japanese Peace and War in Comparative Context", dalam *Aftermath: Legacies and Memories of War in Europe, 1918–1945–1989*, Nicolas Martin, Tim Haughton, dan Pierre Puseigle (edt.). Abingdon: Routledge, 2016.
- Orr, James J. "Peace and Anti-nuclear Movement" dalam *Encyclopedia of Contemporary Japanese Culture*, Sandra Buckley (edt.). New York: Routledge, 2002.
- Perez, Louis J. "Anti-narita Airport Movement", dalam *Japan at War: An Encyclopedia*, Louis J. Perez (edt.). ABC-CLIO, 2013.
- Sakamoto, Kazuya. "Condition at Independent State." In *The Diplomatic History of Postwar Japan*, Makoto Iokibe (edt.). Abingdon: Routledge, 2013.
- Sasaki-uemura, Weasley. "Anpo Struggle" dalam *Encyclopedia of Contemporary Japanese Culture*, Sandra Buckley (edt.). New York: Routledge, 2002.
- Shigematsu, Setsu. *Scream from the Shadows the Womens Liberation Movement in Japan*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2012.
- To go, Kazuhiko. *Japans Foreign Policy, 1945-2009: The Quest for a Proactive Policy*. Leiden: Brill, 2010.
- Wada, Masamune. *Nihonkoku Kenpo Kaitei: Kokumin Ga Kangaeru Kuni No Katachi*. Tokyo: Subarusha, 2018.
- Yamamoto, Mari. *Grassroots Pacifism in Post-war Japan: The Rebirth of a Nation*. London: Routledge, 2004.

### **Internet**

- Prime Minister of Japan and His Cabinet. "Constitution". [http://japan.kantei.go.jp/constitution\\_and\\_government\\_of\\_japan/constitution\\_e.html](http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html) (diakses April 26, 2018).

Japanese Law Translation. "The Constitution of Japan". [http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail\\_main?id=174](http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=174) (diakses Mei 22, 2019).

Japan Times. "Abe's Route to Revising Article 9 Crosses Minefield of Legalese". <https://www.japantimes.co.jp/news/2018/03/12/reference/abes-route-revising-article-9-crosses-minefield-legalese/#.XOS8w9IzbIV> (diakses Mei 22, 2019).

The Asahi Shinbun. "18,000 Protest Constitutional Revision in Front of Diet Building". <http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201811040022.html> (diakses Mei 22, 2019).

### **Koran**

Masaru, Ichinose. "Secluded Island "Okinawa" Continue Distress." Rikkyo Echo, Oktober 1965, Vol. 19, No. 4.

Tidak Teridentifikasi. "Gakusei Heiwa Kaigi Owaru." Rikkyo Daigaku Shinbun, April 20, 1954.

Tidak Teridentifikasi. "Haneda-Clash Significant for Student Movement." Rikkyo Echo, Vol. 2, No. 4, November 1967.

Tidak Teridentifikasi. "Kike Wadatsumi No Koe Gekika." Rikkyo Daigaku Shinbun, June 1, 1954.

Tidak Teridentifikasi. "Reconsider Revision of The Constitution." Rikkyo Echo, Vol. 18, No. 3, Maret 1964.

Tidak Teridentifikasi. "Return Of Okinawa Remains Not Realized." Rikkyo Echo, Vol. 22, No. 5, Desember 1967.

Tidak Teridentifikasi. "What Zengakuren's True Movement and Purpose?" Rikkyo Echo, , Vol. 21, No. 3, Oktober 1967.